



RENJA

(RENCANA KERJA)

PERUBAHAN

KECAMATAN JATIROTO

TA. 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jatiroto dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Rencana Kerja Perubahan ini disusun berpedoman pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap PD diwajibkan untuk menyusun Renja - P PD dengan mengacu kepada Renstra PD Tahun 2018 - 2022, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Kecamatan Jatiroto tahun 2022 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jatiroto guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan Rencana Kerja dilakukan dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan PD serta dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan alokasi anggaran disesuaikan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan PD.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan perubahan Tahun 2022 pada PD Kecamatan Jatiroto. Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jatiroto Tahun 2022 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kecamatan Jatiroto.

Lumajang, Agustus 2022

CAMAT JATIROTO



IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM

NIP. 19750921 199602 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA - P PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja - P Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.....	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	55
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja - P Perangkat Daerah.....	57
3.3 Program dan Kegiatan.....	64
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	82
BAB V PENUTUP.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang membuat Renja - P yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Instansi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja - P 2022 yang ditetapkan dengan surat keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja - P

Rencana Kerja Perubahan merupakan Rencana Kerja Perubahan selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Perubahan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (P - Renstra). Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jatiroto menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Selain itu dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran, indicator dan target dari Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Jatiroto.

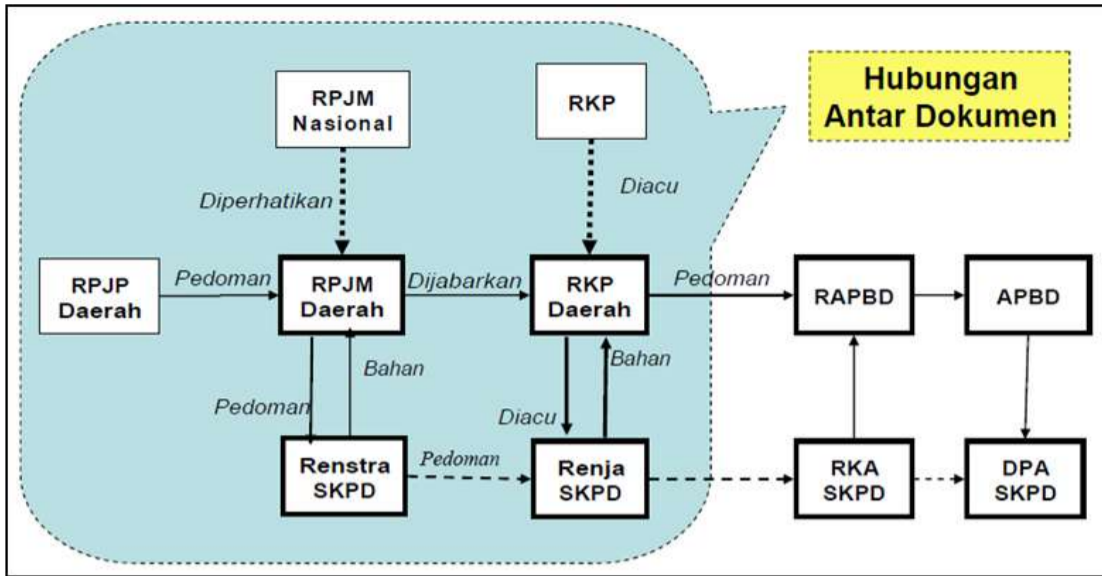
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja - P

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja - P PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja - P PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja - P PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian P Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja - P PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja - P PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perubahan PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari P Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Presiden No 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan;
13. Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
26. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor xx Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Tahun 2018-2022;

-1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai salah satu acuan bagi

Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran perubahan.

Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Kecamatan Jatiroto untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA - P PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja - P Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja - P Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA - P PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - P Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja - P tahun lalu (2021) dan Tahun n-1 2022 berdasarkan target indikator kinerja program tidak memenuhi target P-Renstra . Terdapat 3 Program, 5 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target sesuai Perencanaan Renstra dan Renja - P. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - A. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - B. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- II. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
 - A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum

1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat

III. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di maksud direncanakan dalam P-Renstra 2018 – 2022, namun demikian dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran maka kegiatan dimaksud tidak dapat direalisasikan pada tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut maka mempengaruhi terhadap capaian target Renstra sampai dengan tahun 2022.

Tahun 2020 sampai dengan 2020 masih terjadi pandemi Covid 19. Anggaran APBD lebih difokuskan (refocusing) untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid 19. Target yang sebelumnya ditetapkan 100%, harus mengalami penurunan sampai dengan 67%.

Tabel 2.1
T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiroto

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja - P Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
										Target Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN	N/A	10 ASN	10 ASN	100%	10 ASN	10 ASN	100%
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	36 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja - P Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
										Target Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD	3 Dokumen/ Eks	N/A	1 Dokumen/ Eks	1 Dokumen/ Eks	100%	- Dokumen	2 Dokumen/ Eks	67%
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	N/A	Laporan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33%
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	- %	100 %	33%
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	36 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%	- Bulan	12 Bulan	33%
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	100 %	100.0 %	94%
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang disediakan	12 Jenis	N/A	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	8 Jenis	67%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	94 Jenis	N/A	37 Jenis	37 Jenis	100%	20 Jenis	57 Jenis	61%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja - P Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
										Target Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	4 Jenis	N/A	4 Jenis	4 Jenis	100%	3 Jenis	4 Jenis	100%
							Jumlah fasilitasi Penggandaan Dokumen	69,560 Lembar	N/A	34,560 Lembar	34,560 Lembar	100%	23,265 Lembar	57,825 Lembar	83%
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	690 Orang	N/A	482 Orang	482 Orang	100%	Orang	482 Orang	70%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi rapat koordinasi SKPD	36 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%
							Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi	36 Kali	N/A	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	24 Kali	67%
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	25 %	100 %	100%
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	7 Rekening	N/A	7 Rekening	7 Rekening	100%	7 Rekening	7 Rekening	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja - P Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
										Target Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	36 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	8 Jenis	N/A	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	9 Jenis	N/A	4 Jenis	4 Jenis	100%	2 Jenis	6 Jenis	67%
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Jenis	N/A	1 Jenis	1 Jenis	100%	- Unit	1 Jenis	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja - P Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
										Target Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	N/A	90 %	90 %	%		100 %	33%
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 %	N/A	90 %	90 %	%		100 %	33%
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor	3 Dokumen / Eks	N/A	1 Dokumen / Eks	1 Dokumen / Eks	Dokumen / Eks		1 Dokumen / Eks	33%
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	93.33 %	N/A	90.00 %	91.33 %	91.33	91.56 %	91.56 %	98%
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kelompok pemberdayaan desa yang terfasilitasi	93.33 %	N/A	90.00 %	91.33 %	91.33	91.67 %	91.67 %	98%
7	01	03	2	01	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	225 Orang	N/A	75 Orang	75 Orang	100%	75 Orang	75 Orang	33%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja - P Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
										Target Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	5 Kelompok	N/A	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	1 Kelompok	4 Kelompok	80%
7	01	04				Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan upaya trantibum	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	-	100 %	67%
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi terkait ketentraman dan ketertiban umum	6 Desa	N/A	6 Desa	6 Desa	100%	-	6 Desa	100%
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah fasilitasi harmonisasi hubungan toma, toga	3 Kegiatan	N/A	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	33%
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90 %	N/A	90 %	90 %	100%	100 %	100 %	100%
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan lintas sektor yang difasilitasi	2 Kegiatan	N/A	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	100 %	100 Kegiatan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja - P Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
										Target Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas forkompimka	36 Bulan	N/A	3 Bulan	3 Bulan	100%	12 Bulan	15 Bulan	42%
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi	94 %	N/A	83 %	83 %	83%	88 %	94 %	94%
7	01	06	2	01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	94 %	N/A	83 %	83 %	83%	88 %	94 %	94%
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Desa	N/A	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	6 Desa	100%
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Desa	N/A	2 Desa	2 Desa	100%		2 Desa	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja - P Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
										Target Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja - P Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7	01	06	2	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	3 Dokumen/ Eks	N/A	1 Dokumen/ Eks	1 Dokumen/ Eks	100%	1 Dokumen/ Eks	33%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatiroto dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam P-Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel 2.2
T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Lumajang

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiroto

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9+6)/2	(11)=(7)	(12)=(8)	(13)
1	Nilai IKM Kecamatan	N/A	N/A	83.12	83.85	N/A	N/A	83.12	87,92	N/A	N/A	Nilai IKM Kecamatan 2022 dan 2024 menjadi Indikator Tujuan Kecamatan
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	90	91.33	93.33	-	90	86,67	93.33	-	Realisasi sampai dengan Mei 2022
3	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/A	N/A	83.33	88.33	94.44	-	83.33	66,67	94.44	-	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.3
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Nilai IKM Kecamatan	Kuantitatif	<i>Survey Kepuasan Masyarakat</i>	Penghitungan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jatiroto atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survey secara berkala
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi}} \times 100$ %	Data bersumber dari seluruh Seksi dan Subag terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi secara berkala
3	Rata - rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kuantitatif	$\frac{(\text{Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu}) + (\text{Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu}) + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen Adm Pemerintahan Desa}} \times 100$ %	Data bersumber dari Seksi Pemerintahan terhadap laporan desa yang telah diselesaikan.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis SWOT

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Jatiroto berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Jatiroto dapat diidentifikasi.

I. Faktor Kekuatan (*Strengths*)

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
2. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomer 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Jatiroto;
3. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
4. Pola kerja di Kantor Kecamatan Jatiroto yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

II. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di

- tingkat kecamatan;
4. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)
 5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
 6. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 7. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
 8. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
 9. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
 10. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
 11. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai

III. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari PD terkait;
3. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya administrasi kependudukan.
4. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
5. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;

6. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
7. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
8. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;

IV. Faktor Ancaman (Threats)

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Jatiroto didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik	Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk
			Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
			Kurang optimalnya pelayanan, sarana dan prasarana Perijinan
			Kurang optimalnya pelayanan Kedinasan
			Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
			Kualitas pelayanan masyarakat masih kurang
			Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi
			Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
		Penilaianan BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah masih kurang	Belum Optimalnya tertib penatausahaan keuangan daerah
		Masih sering terjadi gangguan keamanan	Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik daerah
2	Rendahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis gender	Kurangnya pembangunan yang berbasis gender	Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum
		Rendahnya jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri	Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil di lapangan sulit diketahui
			Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
			Kurang optimalnya upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) di seluruh Desa
		Adanya Pandemi Covid 19	Kurangnya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
			Kurangnya kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa
			Proses Perencanaan Pembangunan Desa belum optimal
	Kurangnya Pemberdayaan masyarakat, Lebaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat		
	Kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19		

2.3.3 Faktor – faktor Keberhasilan

1. Komitmen terhadap Rencana Program dan Kegiatan yang ada;
2. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
3. Melaksanakan penyelesaian SPJ dan program kegiatan sesuai rencana;
4. Disiplin kinerja Aparatur Sipil Negara;
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
6. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;
7. Inisiatif, kreatif dan kerjasama tim;
8. Faktor kepemimpinan, aspek yang menjadi factor keberhasilan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pemimpin serta pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin.

2.3.4. Program Strategis Kabupaten

Berdasarkan telaah isu strategis daerah yang berkembang di masyarakat, dirumuskan 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program strategis merupakan implementasi usulan program kepala daerah terpilih Tabel berikut menjabarkan 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4

Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
1	Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat	Layanan Melahirkan gratis di Fasyankes standart kelas 3	Ibu melahirkan dengan standart kelas 3

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
2	Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya	Pemenuhan listrik	Dusun belum berlistrik
		Pemenuhan air bersih	Dusun wilayah utara dan rawan air bersih
3	Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Bantuan seragam gratis	Siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
		Bantuan SPP gratis	Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
4	Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu
5	Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar	Tambahan tunjangan/ honor	Guru non NIP, Madin, TPQ, mengaji masjid/langgar
6	Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal
		Bantuan Rukem	Rukun kematian
7	Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik	Pengadaan WIFI	Sarana publik
			Desa/kelurahan
		Pengadaan CCTV	Sarana publik dan daerah rawan

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
8	Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasiran, dan Yosowilangun	Pembangunan stadion standart nasional	Stadion Semeru
		Pembangunan stadion standart regional	Stadion Kecamatan Klakah, Pasiran, Yosowilangun
9	Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna
		Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda	Kelompok organisasi pemuda
		Pemberdayaan lansia	Lansia
		Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas
10	Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda	Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian	Gedung Soedjono
11	Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi	Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol	Pemerintah Pusat
12	Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix	Jalan Kabupaten
		Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Jalan penghubung Pasirian-Tempursari
13	Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan	Pembangunan Ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan
		Pembangunan taman layak anak	Seluruh kecamatan

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
14	Fasilitasi pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi	Fasilitasi BUM Tren	Pondok Pesanren
15	Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga	Rehabilitasi pasar tradisional	Pasar tradisional
		Stimulasi pinjaman tanpa bunga	Koperasi pasar tradisional
16	Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian	Optimalisasi potensi pariwisata	Stake holder sektor pariwisata
		Optimalisasi potensi pertanian	Stake holder sektor pertanian
17	Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan	Pelayanan adminduk sistem online	Seluruh Kecamatan
18	Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan	Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap	Integrasi Layanan Perizinan
19	Tambahkan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Pemberian TPP	PNS
		Standarisasi honor sesuai UMK	Tenaga kerja kontrak

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
20	Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Seluruh Kepala Desa dan Perangkat
		Tunjangan RT/RW	Seluruh RT/RW

Kesuksesan program strategis harus didukung sepenuhnya oleh masing Masing Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang. Khusus untuk PD Kecamatan mendukung Program Strategis Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan system online, tuntas di Kecamatan. Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan telah dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan melalui kecamatan. Program ini akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh kecamatan, melalui penempatan operator adminduk dari Dispenduk Capil di tiap kecamatan guna mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk.

Pada Tahun 2021 branding layanan administrasi kependudukan adalah tahun peningkatan layanan dengan memberikan penekanan kepada layanan yang semakin mudah, cepat dan aman.

Tahun 2019, proses pencetakan E KTP dilaksanakan di Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang. Kecamatan hanya sebagai perekaman saja. Untuk selanjutnya berkas pendukung dalam rangka pencetakan E KTP dikirim ke Dispenduk Capil Lumajang untuk dilakukan pencetakan. Setelah tercetak, staf Kecamatan mengambil E KTP tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada warga. Hal ini memerlukan waktu pelayanan lebih lama.

Tahun 2020 sampai dengan sekarang, proses pencetakan dilakukan di Kecamatan Jatiroto, jika tidak ada kendala dengan data, pelayanan E KTP tidak sampai 5 menit.

Begitupun dengan Kartu Keluarga, tahun 2019 Kecamatan melakukan pencetakan di Kecamatan selanjutnya berkas dikirim ke Dispenduk untuk dilakukan penandatanganan. Namun Tahun 2020 sampai dengan saat ini, Cetak Kartu keluarga selesai di Kecamatan dan dapat ditunggu ditempat oleh warga.

Tabel 2.5**DATA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JATIROTO**

Jenis Pelayanan	Jumlah Masyarakat yang Terfasilitasi				Total
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (per April 2022)	
Akta Kelahiran	643	727	832	268	2,470
Akta Kematian	425	550	694	203	1,872
Kartu Keluarga	1,925	2,455	5,817	1,382	11,579
Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	1,836	2,562	3,652	1,071	9,121
Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	-	325	325
Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten	132	145	153	61	491
Jumlah	4,961	6,439	11,148	3,310	25,858

Catatan :

1. Tahun 2019 Pelayanan Penandatanganan KK dan cetak KTP dilaksanakan di Dispenduk Capil Lumajang
2. Tahun 2020 sampai dengan saat ini pelayanan KK dan EKTP selesai di Kecamatan

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.7
T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jatiroto

No		Rancangan Perubahan RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	100%	1.611.319.300	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	-	1.408.570.189	
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	8.750.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.750.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	- Dokumen	-	

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan	-	
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	1.136.479.300	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	1.079.315.541	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang / Bulan	1.105.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang / Bulan	1.057.529.541	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.979.300	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21.276.000	
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	- Dokumen	-	
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	2.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	510.000	
13	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.500.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	

14	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.500.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	
15	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	120.250.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	71.613.730	
16	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	2.979.350	
17	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	46.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	24.616.130	
18	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	26.250.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	9.162.250	
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	34.856.000	
21	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	32.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
22	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan	1 Unit	32.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan	- Unit	-	

23	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	239.240.000	Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daeah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	226.038.518	
24	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	41.346.518	
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	189.240.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	184.692.000	
26	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	70.100.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	31.602.400	
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	60.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	22.102.400	
28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah peralatannya dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	9.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah peralatannya dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	9.500.000	
31	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	7.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	-	
32	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	7.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	

33	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 Dokumen	7.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	- Dokumen	-	
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	91,33 %	162.500.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	91,33 %	18.783.250	
35	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	91,33 %	162.500.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	91,33 %	18.783.250	
36	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.100.000	
37	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	6 Laporan	155.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	1 Laporan	14.683.250	
38	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban	100%	35.850.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban		-	
39	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	35.850.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	

40	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35.850.000	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Laporan	-	
42	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	15.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.400.000	
43	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	15.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.400.000	
44	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2.400.000	
45	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	83%	205.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	83%	151.200.000	
Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu			100%	Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu				100%			
Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu			83%	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				83%			

46	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88,33 %	205.000.000	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88,33 %	151.200.000	
47	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	195.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	151.200.000	
48	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	- Laporan	-	
JUMLAH					2.036.669.300					1.580.953.439	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Perubahan didiskusikan dalam pembahasan forum PD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja - P dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum PD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan lokasinya kepada Kecamatan Jatiroto. Namun demikian, usulan – usulan tersebut tidak masuk dalam dokumen perencanaan Kecamatan Jatiroto. Usulan Musrenbang dari masyarakat melalui Desa, difasilitasi oleh PD Kecamatan Jatiroto untuk selanjutnya direalisasikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu Kegiatan dimaksud. Dengan demikian, usulan program / kegiatan NIHIL untuk dokumen perencanaan Kecamatan Jatiroto sebagaimana table TC 32

Tabel 2.8
T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2022
KABUPATEN LUMAJANG

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiroto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto menghadirkan Inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Inovasi tersebut adalah dengan : **PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN TIBA DIRUMAH (SAKTI BAMA)**

Inovasi dilaksanakan mulai 23 Februari 2021 sampai dengan sekarang.

2.6.1 Latar Belakang Masalah

Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Jatiroto dalam mengurus Santunan Kematian dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya karena ketidaktahuan mereka tentang administrasi Pemberian Santunan Kematian. Selama ini warga masyarakat akan mengajukan Santunan Kematian hanya apabila mereka dibantu oleh orang lain yang pada akhirnya orang tersebut meminta beberapa persen uang hasil Santunan Kematian sehingga banyak dari warga menjadi calo untuk mengurus administrasi Santunan Kematian dengan harapan dapat insentif hasil Pemberian Santunan Kematian. Masyarakat belum menyadari bahwa santunan kematian sebenarnya mudah untuk menyelesaikan administrasinya. Masyarakat terkadang enggan untuk mengurus administrasi santunan kematian yang menurut mereka masih sulit, sehingga meminta bantuan orang lain untuk menguruskan dan mereka hanya menerima 75% dari santunan kematian yang diterima.

2.6.2 Tujuan

Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, Kecamatan Jatiroto membuat Inovasi berupa Pemberian Santunan Kematian Tiba Dirumah Masyarakat yang berduka sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor kecamatan, namun tim Pemberian Santunan Kematian Tiba Dirumah akan mendatangi masyarakat tersebut .

2.6.3 Manfaat

Hasil yang di dapat setelah dilakukan Inovasi ini masyarakat merasa pemerintah hadir dan dekat dengan masyarakat yang sangat membutuhkan biaya setelah mengalami duka ditinggalkan keluarga. Selain mendapatkan Santunana Kematian yang langsung diantar kerumah yang bersangkutan, bagi keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan produk lain pelayanan pendudukan antara lain :

1. KK baru (dengan sudah terhapusnya nama anggota keluarga yang meninggal);
2. KTP baru (dengan status baru bagi pasangan yang ditinggalkan);
3. Akta Kematian bagi yang meninggal.

Dampak Inovasi SAKTI BAMA antara lain :

Sebelum adanya Inovasi SAKTI BAMA

1. Masyarakat tidak mendapatkan dana santunan kematian secara penuh Rp. 1.000.000 karena harus memanfaatkan pihak lain, sehingga berkurang untuk memberikan uang jasa terhadap pihak lain.
2. Anggota keluarga yang sudah meninggal masih terdaftar di Kartu Keluarga karena masyarakat tidak mengajukan proses perubahan Kartu Keluarga

Setelah adanya Inovasi SAKTI BAMA

1. Masyarakat termudahkan untuk mendapatkan produk Pelayanan Umum Kecamatan;
2. Masyarakat penuh pendapatkan dana santunan sebesar Rp. 1.000.000;
3. Produk Administrasi Kependudukan lainnya bagi masyarakat tersebut mendapatkan pembaharuan;
4. Menghindari adanya pihak – pihak yang memanfaatkan masyarakat lain untuk mendapatkan uang jasa bagian dari Santunan Kematian;
5. Masyarakat tidak abai akan pentingnya Administrasi kependudukan.

2.6.3 Alur Inovasi Pelayanan

Struktur organisasi Inovasi SAKTI BAMA adalah sebagai berikut :

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Camat Jatiroto, bertugas :

- 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Inovasi Santunan Kematian Tiba Di Rumah

b. Ketua

Ketua Tim Inovasi Santunan Kematian Tiba Di Rumah adalah Sekretaris Kecamatan Jatiroto, yang bertugas :

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim
- 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap laporan Pemberian Santunan Kematian

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Jatiroto, yang bertugas :

- 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan Inovasi Pemberian Santunan Kematian Tiba Dirumah.
- 2) Menyusun laporan Pemberian Santunan Kematian.

d. Anggota

- 1) Menerima berkas permohonan masyarakat tentang Santunan Kematian.
- 2) Mengantarkan Santunan Kematian Tiba Dirumah.

Alur dari proses Inovasi SAKTI BAMA adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat hadir ke Desa untuk mendapatkan Surat Keterangan kematian;
2. Selanjutnya hadir ke Kantor Kecamatan Jatiroto bagian Pelayanan Umum dengan membawa berkas :
 - Foto Copy KTP yang meninggal
 - Foto copy Kartu keluarga
 - Surat Pengantar RT dan RW
 - Surat Keterangan Kematian dari Desa
 - Nomor Kontak Person anggota keluarga yang bisa dihubungi.
3. Petugas Pelayanan umum Kecamatan Jatiroto memproses Santunan Kematian ke Dinas Sosial dan PP Kabupaten Lumajang;
4. Jika Uang Santunan Kematian tersebut cair, Petugas Kecamatan Jatiroto mengambil uang tersebut di Dinas Sosial dan PP Kabupaten Lumajang;
5. Petugas Pelayanan Kecamatan Jatiroto melakukan register dan dilakukan rekapan Santunan Kematian;
6. Petugas Pelayanan Kecamatan Jatiroto memperbarui Kartu Keluarga dan KTP pasangan yang meninggal dunia;
7. Petugas Inovasi SAKTI BAMA berkunjung kerumah masyarakat dengan membawa produk pelayanan untuk diserahkan langsung kepada yang bersangkutan antara lain :
 - Dana Santunan Kematian sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - Kartu Keluarga Baru dengan nama anggota keluarga yang meninggal dunia sudah terhapus;
 - Akta Kematian;
 - KTP baru pagi pasangan suami/istri yang meninggal dunia.

2.6.4 Kendala Pelaksanaan Inovasi

Setelah dilakukan inovasi Pemberian Santunan Kematian Tiba Dirumah terdapat beberapa masalah antara lain

1. Tidak adanya operasional BBM khusus sehingga tim secara Swadaya / sukarela untuk mengantarkan santunan Kematian tersebut;
2. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat, belum sepenuhnya masyarakat tahu akan inovasi ini;

2.6.5 Inovasi Pelayanan Yang Sudah Dilaksanakan Sebelumnya

A. Pelayanan Malam dan Medsos

Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, inovasi di Kecamatan Jatiroto yang sudah berjalan adalah Pelayanan Malam dan Hari Sabtu serta Pelayanan melalui Medsos. Namun demikian pada pertengahan tahun 2020, pelayanan malam tersebut harus dihentikan dikarenakan adanya pandemi Covid 19. Diharapkan setelah Pandemi Covid 19 berakhir inovasi pelayanan tersebut bisa dilanjutkan kembali. Sedangkan untuk Pelayanan melalui Media Sosial tetap berjalan.

1. Latar Belakang

a. Pelayanan Malam

Pelayanan tambahan ini dimaksudkan untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengurus surat - surat kependudukan pada jam kerja dikarenakan warga yang sedang sekolah atau sedang bekerja dan tidak bisa ditinggalkan.

b. Pelayanan melalui Media Sosial

Masyarakat ada yang tidak mengetahui persyaratan administrasi yang harus dibawa ke Kantor Kecamatan Jatiroto untuk mendapatkan Pelayanan Publik.

2. Tujuan

a. Pelayanan Malam

Agar masyarakat bisa mendapatkan Pelayanan Publik sesuai dengan waktu kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiroto

b. Pelayanan melalui Media Sosial

Memudahkan mobilisasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik

3. Manfaat

a. Pelayanan Malam

Kebutuhan akan pelayanan publik baik itu administrasi kependudukan, Santunan Kematian, Surat Keterangan Tidak mampu atau pelayanan lainnya terpenuhi.

c. Pelayanan melalui Media Sosial

Masyarakat tidak perlu datang beberapa kali ke Kantor Kecamatan Jatiroto dikarenakan persyaratannya ada yang kurang. Dengan adanya layanan ini bisa menghemat waktu bagi warga yang melakukan pelayanan kependudukan.

4. Alur

a. Pelayanan Malam

Alur sama dengan pelayanan pada jam kerja normal. Pelayanan Malam dibuka mulai Jam 18.00 sampai dengan 21.00 WIB. Serta Pelayanan Hari Sabtu mulai jam 08.00 sampai dengan 11.00.

b. Pelayanan melalui Media Sosial

Warga masyarakat mengupload persyaratan berkas administrasinya melalui layanan Whatsaap PD Kecamatan Jatiroto, selanjutnya petugas memproses. Jika sudah selesai, baru kemudian warga ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas asli persyaratan pelayanan dan mengambil produk pelayanan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

3.1.1 Program Prioritas Nasional

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.1.2 Program Prioritas Provinsi

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian social dan pelestarian nilai – nilai budaya lokal
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat di Jawa Timur.

2.3.5. Program Prioritas Kabupaten Lumajang

Program Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terdiri dari 7 point yaitu :

1. Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata.
2. Peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi.
3. Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai – nilai budadaya lokal.
5. Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan.
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.

7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan pelayanan publik untuk kemudahan investasi.

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, dalam hal ini PD Kecamatan Jatiroto secara teknis mengampu kewilayahan. Sehubungan dengan hal tersebut, PD Kecamatan Jatiroto mendukung program kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ke tujuh yaitu Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan pelayanan public untuk kemudahan investasi. Dukungan tersebut Nampak dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan PD Kecamatan Jatiroto Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersbut telah dilaksanakan inovasi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam meingkatkan pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan dalam Survey Kepuasan Masyarakat. Dalam hal ini, hasil SKM PD Kecamatan Jatiroto Tahun 2022 menunjukkan nilai 83,85 %, atau BAIK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja - P Perangkat Daerah

3.2.1. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);.

4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan Bermartabat”.

3.2.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

No.	Misi	Penjelasan Misi
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2022 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Jatiroto mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

3.2.3. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Jatiroto untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya kepuasan masyarakat. Dengan target dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Penghitungan	Target Kinerja Tujuan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap Tiga Bulan sekali	83,85 %

3.2.4. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatiroto selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Jatiroto, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan .

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Sasaran Perangkat Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS PENGHITUNGAN	TAHUN 2022
1		Nilai IKM Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat dengan 100 orang respondens	83,85 %
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$	91.33 %
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu}) + (\text{Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu}) + (\text{Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu})}{\text{Jumlah seluruh desa diwilayah} \times 3 \text{ dokumen Administrasi Pemerintahan Desa}} \times 100\%$	88,33 %

3.2.5.Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik.
- b. Meningkatkan penilaian BPK terkait kinerja keuangan dan asset daerah.
- c. Menanggulangi gangguan keamanan.
- d. Mengurangi pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan atau Perkada
- e. Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender.
- f. Meningkatkan jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri.
- g. Menanggulangi Pandemi Covid 19.

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Kecamatan Jatiroto adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Jatiroto yaitu bertujuan meningkatkan kepuasan masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan juga meningkatkan kualitas serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto antara lain :

1. Meningkatkan sosialisasi tentang kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan.
3. Mengoptimalkan pelayanan, sarana dan prasarana perijinan.

4. Mengoptimalkan pelayanan kedinasan.
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
7. Meningkatkan pemahaman pejabat terhadap tupoksi.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
9. Mengoptimalkan tertib penatausahaan keuangan daerah.
10. Mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik daerah.
11. Menanggulangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
12. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
13. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum.
14. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15. Meningkatkan pendataan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil dilapangan bisa diketahui.
16. Mengoptimalkan implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender.
17. Mengoptimalkan upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) di seluruh Desa.
18. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
21. Mengoptimalkan Proses Perencanaan Pembangunan Desa.
22. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

23. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penagakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah Covid 19.

Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindaklanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Jatiroto diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi umum Perangkat Daerah.
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 3.4
T-C.33 (Perubahan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiroto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Targ et Capaian Kinerja	Kebut uhan Dana / Pagu Indik atif		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
7			Unsur Kewilayahan															
7	01		Kecamatan				2.036.669.300					1.580.953.439		(455.715.861)				
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1.611.319.300			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1.408.570.189	DTU-DAU	(202.749.111)			
7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	8.750.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU-DAU	(8.750.000)		
7	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Renja	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	1.750.000	Penyusunan dokumen Renja	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Dokumen	-	DTU-DAU	(1.750.000)

7	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	2.500.000	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	510.000	DTU-DAU	(1.990.000)			
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	4.500.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU-DAU	(4.500.000)			
7	01	01	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Daerah	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	4.500.000	Penyusunan Laporan Barang Daerah	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Laporan	-	DTU-DAU	(4.500.000)			
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	120.250.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	71.613.730	DTU-DAU	(48.636.270)			
7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pengadaan Alat - alat Listrik	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	3.000.000	Pengadaan Alat - alat Listrik	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	2.979.350	DTU-DAU	(20.650)			
7	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Pengadaan ATK dan Peralatan/ bahan Kebersihan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	37.500.000	Pengadaan ATK dan Peralatan/ bahan Kebersihan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	21.441.090	DTU-DAU	(16.058.910)			
						Pengadaan Peralatan/ bahan Kebersihan	1	1 Paket		8.500.000	Pengadaan Peralatan/ bahan Kebersihan	1	1 Paket		3.175.040	(5.324.960)					
								2 Paket		46.000.000			2 Paket		24.616.130	(21.383.870)					
7	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pembayaran Barang Cetak	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Paket	10.000.000	Pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Paket	9.162.250	DTU-DAU	(837.750)			
						Pembayaran Penggandaan	1	16.250.000			(17.087.750)										
								26.250.000										9.162.250			
7	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Lingkup Kecamatan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Rapat Lingkup Kecamatan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	13.500.000	DTU-DAU	3.500.000			
						Rapat Koordinasi Luar Daerah	2	12.500.000			Rapat Koordinasi Luar Daerah	2	4.556.000			(7.944.000)					
						Rapat Koordinasi Dalam Daerah	1	22.500.000			Rapat Koordinasi Dalam Daerah	1	16.800.000			(5.700.000)					
								45.000.000					34.856.000			(10.144.000)					

7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	32.000.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	-	DTU-DAU	(32.000.000)		
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan	Pengadaan Genset	1			1 Unit	32.000.000	Pengadaan Genset	1		1 Unit	-		(32.000.000)	
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	239.240.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	226.038.518	DTU-DAU	(13.201.482)		
7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan rekening Listrik	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		1 Laporan	450.000	Penyediaan rekening Listrik	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	480.000	DTU-DAU	30.000	
						Penyediaan rekening Internet	1			1 Laporan	32.000.000	Penyediaan rekening Internet	1			1 Laporan	23.926.518		(8.073.482)	
						Penyediaan rekening Telepon	1			1 Laporan	17.550.000	Penyediaan rekening Telepon	1			1 Laporan	16.940.000		(610.000)	
										3 Laporan	50.000.000			3 Laporan		41.346.518	(8.653.482)			
7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Upah Bulanan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		12 Laporan	164.400.000	Penyediaan Upah Bulanan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	164.400.000	DTU-DAU	-	
						Penyediaan BPJS Kesehatan	1			12 Laporan	22.500.000	Penyediaan BPJS Kesehatan	1			12 Laporan	18.150.000		(4.350.000)	
						Penyediaan BPJS Kecelakaan Kerja	1			12 Laporan	990.000	Penyediaan BPJS Kecelakaan Kerja	1			12 Laporan	954.000		(36.000)	
						Penyediaan BPJS Kematian	1			12 Laporan	1.350.000	Penyediaan BPJS Kematian	1			12 Laporan	1.188.000		(162.000)	
										189.240.000					184.692.000	(4.548.000)				
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas Pemeliharaan BMD			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	70.100.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	31.602.400	DTU-DAU	(38.497.600)		
7	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		8 Unit	55.600.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	8 Unit	20.213.900	DTU-DAU	(35.386.100)	
						Pembayaran Pajak Kendaraan	1			8 Unit	5.000.000	Pembayaran Pajak Kendaraan	1			8 Unit	1.888.500		(3.111.500)	
											60.600.000						22.102.400		(38.497.600)	

7	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatannya dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan komputer	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Unit	5.000.000	Pemeliharaan komputer	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Unit	5.000.000	DTU-DAU	-			
							Pemeliharaan Printer	1			4.500.000	Pemeliharaan Printer	1			4.500.000		-			
							9.500.000				9.500.000		-								
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	7.000.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU-DAU	(7.000.000)			
7	01	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	7.000.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU-DAU	(7.000.000)			
7	01	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	7.000.000	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Dokumen	-	DTU-DAU	(7.000.000)			
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	162.500.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	18.783.250	DTU-DAU	(143.716.750)			
7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	162.500.000			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	18.783.250	DTU-DAU	(143.716.750)			
7	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musrenbang	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Pelaksanaan Musrenbang	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000	DTU-DAU	(1.500.000)			
							Koordinasi Musrenbang	2			2.500.000	Koordinasi Musrenbang	2			600.000			(1.900.000)		
							7.500.000				4.100.000		(3.400.000)								
7	01	03	2.01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan PKK	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	37.500.000	Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan PKK	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	14.683.250	DTU-DAU	(22.816.750)			
							Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gerbangmas	1			20.000.000	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gerbangmas	1			-			(20.000.000)		
							Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Paskibra	1			87.500.000	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Paskibra	1			-			(87.500.000)		
							Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pramuka	2			10.000.000	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pramuka	2			-			(10.000.000)		

7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	93%	205.000.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	93%	151.200.000	DTU-DAU	(53.800.000)			
7	01	06	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan administrasi Keuangan Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	160.000.000	Upah Bulanan TPD dan Korcam	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	151.200.000	DTU-DAU	(8.800.000)	
							Monitoring dan Evaluasi administrasi Pemerintahan Desa	1			35.000.000	Monitoring dan Evaluasi administrasi Pemerintahan Desa	1			-		(35.000.000)	
											195.000.000					151.200.000		(43.800.000)	
7	01	06	2.01	18	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan monitorin dan evaluasi pembangunan Desa dari anggaran APBdesa	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan kegiatan monitorin dan evaluasi pembangunan Desa dari anggaran APBdesa	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Dokumen	-	DTU-DAU	(10.000.000)	
											10.000.000				- Dokumen	-		(10.000.000)	
										TOTAL	2.036.669.300				TOTAL	1.580.953.439	(455.715.861)		

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jatiroto Tahun 2022 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	-	1.408.570.189
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	- Dokumen	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan	-
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	1.079.315.541
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang / Bulan	1.057.529.541
8	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21.276.000

9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	- Dokumen	-
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	510.000
13	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	-
14	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-
15	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	71.613.730
16	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	2.979.350
17	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	24.616.130
18	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	9.162.250
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	34.856.000
21	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
22	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan	- Unit	-
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	226.038.518
24	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	41.346.518
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	184.692.000
26	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	31.602.400

27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	22.102.400
28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah peralatannya dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	9.500.000
31	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	-
32	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-
33	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	- Dokumen	-
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	91,33 %	18.783.250
35	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	91,33 %	18.783.250
36	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.100.000
37	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	1 Laporan	14.683.250
38	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban		-
39	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-
40	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Laporan	-
42	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.400.000

43	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.400.000
44	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2.400.000
45	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	83%	151.200.000
			Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%	
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	83%	
46	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88,33 %	151.200.000
47	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	151.200.000
48	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	- Laporan	-
JUMLAH					1.580.953.439

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Jatiroto Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp. 1.580.953.439,-**, yang bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum. Adapun untuk perincian kegiatan sebagai berikut .

Tabel 4.2
Anggaran Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2022

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiroto

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
1	Belanja Operasi	2.004.669.300	1.580.953.439
2	Belanja Pegawai	1.128.979.300	1.078.805.541

3	Belanja Barang	875.690.000	502.147.898
4	Belanja Modal	32.000.000	-
5	Belanja Peralatan dan Mesin	32.000.000	-
6	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-
7	JUMLAH BELANJA	2.036.669.300	1.580.953.439

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Jatiroto Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiroto 2018-2023 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan Rencana Kerja Perubahan dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyatakan Rencana Kerja Perubahan PD merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berikutnya..

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jatiroto ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi PD dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - P PD) Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (P Renstra – PD). Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Selain itu dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran, indikator dan target dari Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Jatiroto

Dengan harapan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Tahun 2022 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Jatiroto, 01 Agustus 2022

CAMAT JATIROTO



IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM

NIP. 19750921 199602 1 002